

Judul : Pengungsi Gaza diserang, DPR: Israel langgar gencatan senjata
Tanggal : Selasa, 03 Februari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Pengungsi Gaza Diserang

DPR: Israel Langgar Gencatan Senjata

LEGISLATOR Senayan mengancam keras serangan Israel yang menghantam Kamp Pengungsi Ghaihi, Al-Mawasi, Khan Younis, Jalur Gaza, Palestina pada Sabtu (31/1/2026). Serangan di tengah gencatan senjata itu menewaskan sedikitnya 30 warga Palestina.

Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta menilai serangan Israel yang menasar warga sipil tersebut sebagai sebuah tragedi kemanusiaan dan bentuk pelanggaran hukum humaniter internasional. Serangan ini juga melanggar kesepakatan gencatan senjata yang tengah berlangsung. "Sejak gencatan senjata yang diberlakukan pada 10 Oktober 2025, berulang kali terjadi serangan Israel ke warga sipil," kata Sukamta dalam keterangannya, Minggu (1/2/2026).

Sukamta mengatakan, berdasarkan laporan Pemerintah Palestina di Gaza, sedikitnya sebanyak 488 tewas dan melukai 1.350 orang selama gencatan senjata berlangsung. Sungguh memilukan apa yang terjadi di

Gaza, semua norma kemanusiaan dan norma hukum terus dilanggar, tanpa ada konsekuensi. "Tidak ada penyelidikan atas kejahatan terorganisir yang terus dilakukan oleh Israel," kritiknya.

Sukamta berharap, Pemerintah Indonesia aktif mendorong institusi internasional untuk melakukan langkah konkret dan terukur dalam menyikapi dan menghentikan kekerasan serta kekejaman yang dilakukan oleh Israel. Karena persoalan utama saat ini adalah kegagalan penegakan norma hukum secara konsisten.

Menurutnya, serangan Israel ini menjadi alarm bagi lembaga baru Dewan Perdamaian Gaza dalam upaya menghadirkan perdamaian di wilayah Palestina. Saat lembaga internasional terlihat lumpuh, keberadaan lembaga baru tersebut diharapkan oleh beberapa pihak bisa menjadi terobosan penghentian kekerasan di Palestina.

"Setiap inisiatif perdamaian akan kehilangan makna jika tidak mampu mencegah pemboman terhadap pengungsi dan



Sukamta

anak-anak," kata legislator asal daerah pemilihan (dapil) Yogyakarta ini.

Senada, anggota Komisi I DPR Syamsu Rizal menilai, serangan itu sebagai bentuk kejahatan kemanusiaan yang terang-terangan dan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun. Ini adalah serangan biadab yang mencederai nilai-nilai kemanusiaan dan merusak gencatan senjata. "Dunia internasional tidak boleh diam," tegas Deng Ical sapaan

akrabnya, Minggu (1/2/2026).

Ia menyoroti fakta karena serangan tersebut terjadi tak lama setelah deklarasi Dewan Perdamaian Gaza yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Aksi Israel itu justru merusak dan menghancurkan kredibilitas lembaga perdamaian yang baru dibentuk itu. "Israel jelas tidak layak menjadi anggota Dewan Perdamaian itu," tegasnya.

Dengan itu, ia meminta agar Israel harus dikeluarkan dari Dewan Perdamaian karena sebagai negara penjajah yang terus-menerus membunuh rakyat Gaza.

Israel tidak pantas duduk dalam forum yang mengatasnamakan perdamaian.

"Jika Israel tetap menjadi anggota, maka organisasi ini hanya akan dijadikan alat untuk melegitimasi pembunuhan warga Gaza dan pengusiran rakyat Palestina dari tanahnya sendiri," kata politikus PKB ini.

Selain itu, ia mengingatkan dengan dalih menyerang Hamas, Israel akan terus membombardir

Gaza secara membabi buta. Hamas selalu dijadikan alasan, padahal yang menjadi korban adalah rakyat sipil, anak-anak, perempuan, dan pengungsi.

Lebih lanjut, Deng Ical menyoroti iuran keanggotaan Dewan Perdamaian Gaza sebesar Rp 16,7 triliun yang akan dibayarkan Indonesia. Dikhawatirkan dana tersebut justru digunakan untuk mendukung aksi militer Israel dalam membunuh warga Gaza dengan dalih melucuti senjata Hamas. "Padahal Hamas adalah pasukan yang membela rakyat Gaza dari kezaliman Israel," tegasnya.

Untuk itu, Deng Ical mendesak Pemerintah Indonesia agar bersikap tegas sebagai bagian dari Dewan Perdamaian Gaza. Pemerintah Indonesia harus lanjut mengkritik dan mengutuk aksi biadab Israel.

"Indonesia tidak boleh terjebak dalam forum perdamaian yang justru dipakai untuk melegitimasi penjajahan dan pembantaian," tutup legislator asal dapil Sulawesi Selatan (Sulsel) ini. ■ TIF